



## **Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir**

**Rezka Prakarsa Ardani**  
**rezka\_darkness@yahoo.com**  
**Joko Setiawan**  
**joko\_esp\_185@yahoo.com**  
**Rida Perwita Sari**  
**rida\_perwita@yahoo.com**

### **Abstract**

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu bangsa merupakan proses yang terencana dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan dalam segala bidang. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat diartikan dengan adanya peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat yaitu pertambahan *Gross Domestic Product* (GDP) pada tahun tersebut melebihi tingkat pertambahan penduduk, serta perkembangan GDP yang berlaku dalam masyarakat diikuti oleh perubahan dan modernisasi dalam struktur ekonominya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja pembangunan atau belanja modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Obyek penelitian adalah Negara Indonesia dengan data perekonomian di Indonesia dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2008 sebagai populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *judgement sampling*, sehingga sampel yang digunakan adalah data perekonomian di Indonesia yang meliputi data penerimaan pajak, data pengeluaran belanja pembangunan/modal, data tingkat inflasi dan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2008, dengan pertimbangan yang diambil adalah adanya ketersediaan kelengkapan data. Teknik analisis dan pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Hasil pengujian dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerimaan pajak, data pengeluaran pembangunan/modal, data tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tiga dekade terakhir.

**Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi**



## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu bangsa merupakan proses yang terencana dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan dalam segala bidang. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui perubahan kemampuan berorganisasi. Kemampuan ekonomi potensial yang dimaksud adalah meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta modal (Jumami, 2004). Keberhasilan kemampuan ekonomi potensial akan dapat mempertinggi kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di bidang lainnya. Salah satu tujuan pembangunan jangka panjang bidang pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya stabilitas ekonomi di bidang pertanian dan industri. Diharapkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Sebagai negara yang berkembang yang menuju era tinggal landas diharapkan Indonesia memiliki landasan yang kuat (Sukirno, 1997).

Berdasarkan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Yuliati (2001:16), dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. Pendapat tersebut didukung Malthus, yaitu untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus di sektor produktif (Irawan dan Suparmoko, 2002:27). Investasi di sektor produktif adalah semua jenis investasi atau penanaman modal yang menambah sumberdaya-sumberdaya baru yang nantinya akan meningkatkan stok modal suatu negara sehingga pada gilirannya nanti akan meningkatkan tingkat *output* dan pendapatan nasional (Arsyad, 2004:214-215).

Menurut model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar tentang “teori pertumbuhan mantap (*steady growth theory*)” yang merupakan pengembangan analisis Keynes, lebih menekankan peranan kunci perlunya penanaman modal dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi (Suryana, 2000:66). Modal atau *capital* sebagai faktor produksi pada pembangunan ekonomi bukan dalam bentuk uang (*money*) tetapi *real capital/capital goods* (barang-barang modal) (Kamaluddin, 1996:71-72). Proses pengeluaran dana modal dalam pemerintah dikenal dengan istilah belanja modal/pembangunan (Halim dan Subiyanto, 2008:4-5). Negara dalam membiayai pengeluaran belanja pembangunan/modal untuk meningkatkan pertumbuhannya bersumber dari penerimaan pajak.

Penelitian Yuliati (2001) di Kabupaten Sleman memberikan kesimpulan bahwa angkatan kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) riil dan belanja pembangunan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian Dritsakis dan Adamopoulos (2004) dalam Hamzah (2007) membuktikan bahwa belanja negara berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Yunani. Selain itu, hasil penelitian Adi (2006) secara statistik memperkuat penelitian



terdahulu bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Jawa-Bali. Namun penelitian yang dilakukan Hamzah (2007) untuk menguji pengaruh belanja, pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran studi kasus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1999-2006, menghasilkan kesimpulan yang berbeda, yaitu belanja dan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, APBN Indonesia yang berdasarkan konsep anggaran keuangan berimbang dari tahun ke tahun keadaan APBN Indonesia lebih sering mengalami keadaan defisit yang diartikan bahwa pengeluaran negara melebihi penerimaan. Untuk itu, perlu diciptakan permintaan efektif, yaitu dengan membuat pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan. Namun ketika permintaan lebih besar dari pada penawaran akan mengakibatkan naiknya harga-harga (inflasi), sehingga inflasi ditengarai memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian apabila inflasi yang terjadi tinggi akan menyebabkan menurunnya tingkat daya beli dan pertumbuhan ekonomi terhambat (Tambunan, 2004). Studi empirik menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Wibisono, 2005). Penelitian Waluyo (2007) mengkonfirmasi penelitian Wibisono bahwa inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerimaan pajak negara, pengeluaran belanja pembangunan atau belanja modal serta tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 30 tahun mulai dari tahun 1979-2008.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerimaan pajak negara, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja pembangunan atau belanja modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menurut Sumitro Djojohadikusumo (1991) adalah suatu proses yang berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Pirade, 2006:9).

Menurut Dr. Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah adalah suatu proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. (Kuncoro, 2004:129; Tarigan, 2007:46). Jadi persentase pertambahan *output* itu haruslah tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan akan berlanjut. Menurut Boediono ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu pertumbuhan ekonomi haruslah “bersumber dari proses intern perekonomian tersebut” (Tarigan, 2007:46).



Todaro (1994:282) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses yang mantap dimana kapasitas produktif dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional/lokal yang semakin besar (Pirade, 2006:11). Sedangkan Prof. Kuznet, *orang yang menerima Hadiah Nobel dalam "Ilmu Ekonomi"* pada tahun 1871, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukan (Suryana, 2000:64).

Menurut pengertian pertumbuhan ekonomi diatas, indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi yang memenuhi kriteria tersebut adalah *gross domestic bruto* (GDP) atau istilah dalam bahas Indonesia diartikan sebagai produk domestik bruto (PDB), yang didefinisikan total nilai atau harga pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya 1 tahun) (Nanga, 2005:13).

Menurut Arsyad (2004:14), PDB/GDP diartikan sebagai jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif, yaitu pertanian; industri pengolahan; pertambangan dan galian; listrik; air dan gas; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; perdagangan; bank dan lembaga keuangan; sewa rumah; pertahanan; dan jasa-jasa lainnya selama satu tahun fiskal.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan beberapa definisi sebelumnya adalah bahwa GDP/PDB merupakan salah satu ukuran atau indikator secara luas yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi atau kegiatan makro ekonomi suatu negara yang dilihat dari 11 atau 9 sektor produktif, meliputi pertanian; industri pengolahan; pertambangan dan galian; listrik; air dan gas; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; perdagangan; bank dan lembaga keuangan; sewa rumah; pertahanan; dan jasa-jasa lainnya selama satu tahun fiskal.

### **Penerimaan Pajak Negara**

Definisi pajak menurut Ilyas dan Suhartono (2007:2), yaitu: 1) pungutan/iuran yang sah berdasarkan undang-undang, 2) tidak ada kontaprestasi langsung terhadap wajib pajak, 3) sifatnya dapat dipaksakan, 4) pemungutan dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat/daerah, 5) pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin.

Menurut UU No. 17 tahun 2003 pasal 1 huruf 9 dan pasal 11 ayat 3, bahwa penerimaan negara adalah semua penerimaan kas yang masuk ke negara terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak serta hibah. Berkaitan dengan penerimaan pajak, berdasarkan UUD 1945 (Amandemen IV) pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa segala pajak digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengklasifikasian penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan (migas dan non-migas), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan



(PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan pajak ekspor.

Definisi pajak yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi sebelumnya adalah pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

### **Belanja Pembangunan/Modal**

Definisi belanja pembangunan, menurut Soetrisno (1984:340) adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, kendaraan, dan lain-lain, maupun pembangunan non-fisik termasuk penataran-penataran, training, dan lain-lain.

Menurut Mardiasmo (2002:67) dan Halim (2007:101) adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah. Sedangkan menurut Halim dan Subiyanto (2008:5), investasi didefinisikan sebagai penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial/manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat. Sedangkan dalam PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal (*capital expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Definisi belanja modal dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai masa mafaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

### **Inflasi**

Menurut Nanga (2005:237) Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Venieris dan Sebold (1978:603) dalam (Nanga, 2005:237), mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu. Berdasarkan definisi inflasi tersebut, ada tiga komponen yang dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus.

### **Hubungan Penerimaan Pajak Negara, Belanja Pembangunan/Belanja Modal, Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengajuan Hipotesis**

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan Walt Whitman Rostow, menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang pada tahap awal pemerintah akan membutuhkan investasi yang besar atau yang lebih dikenal dengan “teori dorongan kuat” (*big push theory*) (Mangkoesobroto, 1993:170).

Model pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar dalam “teori pertumbuhan mantap (*steady growth theory*)“ yang merupakan pengembangan analisis Keynes, lebih menekankan peranan kunci perlunya penanaman modal



dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi (Suryana, 2000:66). Teori tersebut didukung teori pertumbuhan ekonomi Kaum Klasik bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bersumber utama dari modal (Suryana, 2000:59). Modal atau *capital* sebagai faktor produksi pada pembangunan ekonomi bukan dalam bentuk uang (*money*) tetapi *real capital/capital goods* (barang-barang modal) (Kamaluddin, 1996:71-72). Proses pengeluaran dana modal dalam pemerintah dikenal dengan istilah belanja modal/pembangunan (Halim dan Subiyanto, 2008:4-5).

Negara dalam membiayai pengeluaran belanja pembangunan/modal untuk meningkatkan pertumbuhannya bersumber dari penerimaan pajak. Hubungan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, yaitu “bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP/GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar pula” (Mangkoesoebroto, 1993:173).

Selain itu, kondisi APBN Indonesia dari tahun ke tahun sering dalam keadaan defisit yang diartikan bahwa pengeluaran negara melebihi penerimaan. Kebijakan anggaran belanja defisit merupakan kebijakan dalam perekonomian yang perlu dilaksanakan ketika menghadapi masalah pengangguran yang serius. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan bahwa di dalam masyarakat terdapat pengangguran berbagai jenis faktor produksi. Faktor-faktor produksi menganggur karena kurangnya permintaan efektif dari masyarakat. Untuk itu, perlu diciptakan permintaan efektif, yaitu dengan membuat pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan. Namun ketika permintaan lebih besar dari pada penawaran akan mengakibatkan naiknya harga-harga (inflasi), dan inflasi ditengarai memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sehingga berdasarkan latar belakang penelitian yang diperkuat landasan teori dengan didukung hasil penelitian terdahulu, maka diajukan suatu hipotesis, yaitu penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 3 Dekade terakhir (mulai tahun 1979 sampai dengan 2008)

## **Metode Penelitian**

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1988: 152). Pengukuran adalah penetapan atau pemberian angka atau nilai terhadap obyek atau fenomena menurut aturan tertentu (Nazir, 1988: 154).

Variabel adalah sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian atau gejala yang diteliti. Desain Penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerimaan



pajak yang diartikan segala iuran/pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak dengan penetapan tarifnya berdasarkan undang-undang dan pemerintah sebagai pihak pemungutnya; sedangkan belanja pembangunan/modal diartikan sebagai semua bentuk pengeluaran kas oleh pemerintah dalam pengadaan barang modal atau aktiva tetap yang memiliki masa ekonomis lebih dari 1 tahun; dan tingkat inflasi diartikan sebagai bentuk meningkatnya harga-harga. Sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam kawasan Kota Surabaya yang diukur melalui produk domestik bruto (PDB) atau *gross domestic bruto* (GDP). Pengukuran variabel bebas dan terikat menggunakan skala ratio.

### **Teknik Penentuan Populasi dan Sampel**

Obyek penelitian ini adalah Negara Indonesia dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perekonomian di Indonesia dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2008.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *judgement sampling*, yaitu penarikan sampel menggunakan pertimbangan yang sekiranya dapat memberikan prospek yang baik bagi perolehan data yang akurat (Djarwanto, 2001: 19), sehingga sampel yang digunakan adalah data perekonomian di Indonesia yang meliputi data penerimaan pajak, data pengeluaran pembangunan/modal, data tingkat inflasi dan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2008, dengan pertimbangan yang diambil adalah adanya ketersediaan kelengkapan data.

### **Jenis dan Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data *time series* berupa data perekonomian di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

### **Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.**

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penggunaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat diterapkan apabila terpenuhinya asumsi klasik, yaitu BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yang meliputi tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal.

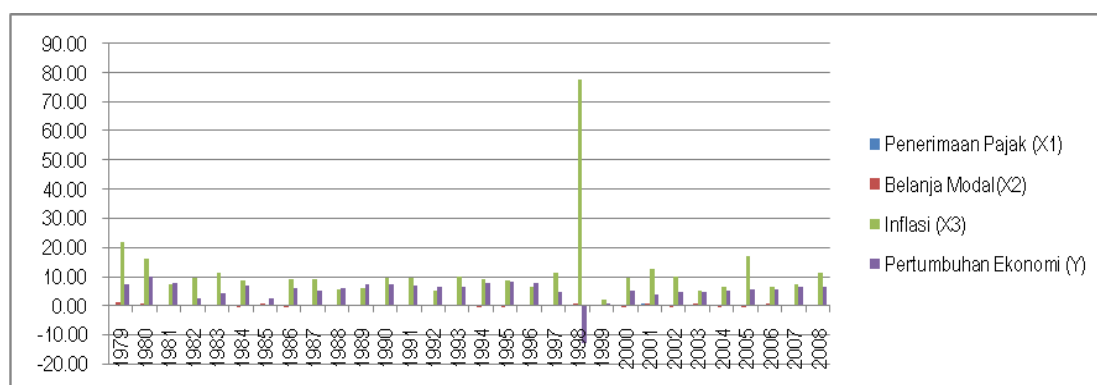
Menurut Djarwanto (2001:23), hipotesis adalah jawaban teoritis atas permasalahan yang dihadapi peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menjawab hipotesis berdasarkan hasil pengujian uji-t dan uji-F dengan tingkat signifikansi 5%. Dasar penentuan taraf nyata 5% digunakan secara umum dalam dunia *science* (kedokteran dan teknik) atau ilmu pasti, sedangkan ilmu sosial dan ekonomi menggunakan taraf nyata 5-20% (Suharyadi dan Purwanto, 2003:394 dan 523).



## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari pengumpulan data dari penerimaan pajak, belanja pembangunan/ belanja modal, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (lihat Lampiran 1) ditunjukkan dalam gambar grafik 1 sebagai berikut:

**Gambar 1:** trend penerimaan pajak, belanja pembangunan/ belanja modal, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi selama tiga dekade terakhir



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009 dan Departemen Keuangan (data diolah)

Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2008 mengalami fluktuasi yang cukup besar, yang dibuktikan kenaikan penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2001 sebesar 0,6% dan terendah terjadi pada tahun 2000 sebesar 0,03%, perkembangan belanja pembangunan/modal tertinggi pada tahun 1979 sebesar 0,98% dan terendah pada tahun 2005 sebesar -0,46%, perkembangan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 1998 sebesar 77,63% dan terendah 1999 sebesar 2,01% dan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjadi pada tahun 1980 sebesar 9,88% dan terendah pada tahun 1998 sebesar -13,13%.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun sebesar -13,13% yang dikarenakan adanya kenaikan tingkat inflasi sebesar 77,63% sehingga menyebabkan daya beli masyarakat yang juga menurun dan berimbas pada penurunan penerimaan pajak dan belanja pembangunan/modal.

Hipotesis penelitian ini yaitu menguji pengaruh penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Hasil analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian tersaji pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1:** Uji Kesesuaian Model dan Persamaan Regresi

Keterangan	Koefisien	t-	Sig	F	Sig
	n				





	Regresi	value			
Konstanta	7,698	7,508	0,00	14,01	0,000
Penerimaan Pajak ( $X_1$ )	0,749	0,157	0	6	
Belanja Pembangunan/Modal ( $X_2$ )	0,197	0,126	0,87		
Tingkat Inflasi ( $X_3$ )	-0,241	-	7		
		5,967	0,90		
			1		
			0,00		
			0		
$R^2 = 0,618$ dan $R = 0,786$					

Sumber : Lampiran 2

Hasil Penelitian yang dilakukan melalui teknik analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut (lampiran 2):

$$Y = 7,698 + 0,749 X_1 + 0,197 X_2 - 0,241 X_3$$

Penjelasan persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta = 7,698, menunjukkan besarnya nilai dari pertumbuhan ekonomi (Y). Apabila penerimaan pajak ( $X_1$ ), belanja pembangunan/modal ( $X_2$ ) dan tingkat inflasi ( $X_3$ ) adalah konstan, maka pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 7,698.
2. Setiap kenaikan penerimaan pajak ( $X_1$ ) sebesar satu persen menyebabkan kenaikan nilai pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,749 persen dengan asumsi Belanja pembangunan/ modal ( $X_2$ ) dan tingkat inflasi ( $X_3$ ) adalah konstan.
3. Setiap kenaikan belanja pembangunan/modal ( $X_2$ ) sebesar satu persen menyebabkan kenaikan nilai pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,197 persen dengan asumsi penerimaan pajak ( $X_1$ ) dan tingkat inflasi ( $X_3$ ) adalah konstan.
4. Setiap kenaikan tingkat inflasi ( $X_3$ ) sebesar satu persen menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,241 persen dengan asumsi penerimaan pajak ( $X_1$ ) dan Belanja pembangunan/ modal ( $X_2$ ) adalah konstan.

Hasil uji kesesuaian model (uji F) pada tabel 1 menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 14,016 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, karena nilai probabilitas  $< 0,05$  (sig  $< 5\%$ ) maka Hipotesis penelitian dapat diterima. Selanjutnya dengan mengetahui besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,618 dapat diperoleh informasi bahwa kecocokan model regresi untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 61,8% dan dari pengolahan data diperoleh keterangan bahwa koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,786, artinya terdapat hubungan antara variabel penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Derajat keeratan hubungan tersebut adalah sebesar 78,6%. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yang menyatakan penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi telah teruji kebenarannya.



Uji t digunakan untuk menguji penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan tidaknya secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 0,157 dengan tingkat signifikan sebesar 0,877, karena nilai probabilitas  $< 0,05$  ( $sig < 5\%$ ), hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Artinya variabel penerimaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel belanja pembangunan/modal mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar 0,126 dengan tingkat signifikan sebesar 0,901, karena nilai probabilitas  $> 0,05$  ( $sig < 5\%$ ), hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Artinya variabel belanja pembangunan/modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel tingkat inflasi mempunyai  $t_{hitung}$  sebesar -5,967 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, karena nilai probabilitas  $> 0,05$  ( $sig < 5\%$ ), hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya variabel tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian dapat membuktikan bahwa variabel penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi teruji secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tiga dekade terakhir (mulai tahun 1979 sampai dengan tahun 2008) dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  dan model regresi yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sesuai / cocok dalam menerangkan pengaruh variabel penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi dengan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pengaruh yang ditunjukkan dalam hasil pengujian penelitian ini adalah pengaruh positif artinya semakin tinggi variabel penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal maka pertumbuhan ekonomi yang dilakukan semakin meningkat, sebaliknya pada tingkat inflasi menunjukkan pengaruh negatif artinya semakin tinggi tingkat inflasi maka pertumbuhan ekonomi menurun.

Tidak terdapatnya pengaruh penerimaan pajak dan belanja pembangunan/modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia mendukung penelitian Hamzah (2007). Penelitian ini bertentangan dengan teori Peacock dan Wiseman dengan didukung penelitian Yulianti (2001) yang menyatakan bahwa peningkatan pajak akan menyebabkan meningkatnya belanja pembangunan/modal yang nantinya akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini mendukung penelitian Wibisono (2005) dan Penelitian Waluyo (2007) yang menyimpulkan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Konfirmasi Hasil Penelitian dengan Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian untuk memberikan bukti empiris bahwa penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi telah tercapai dengan hasil penelitian bahwa tingkat inflasi



berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan penerimaan pajak dan belanja pembangunan/modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Jadi konfirmasi hasil penelitian dengan tujuan dan manfaat dalam penelitian ini belum tercapai, sehingga rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk menguji kembali kedua variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak dan belanja pembangunan/modal dengan menggunakan obyek penelitian dan rentang waktu yang berbeda.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dirasakan oleh peneliti telah di lakukan secara optimal, namun demikian peneliti merasa dalam hasil penelitian ini masih adanya keterbatasan antara lain dalam penelitian ini hanya menguji variabel penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini.

### **Kesimpulan**

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian ini adalah penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hasil pengujian secara parsial variabel penerimaan pajak, belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia membuktikan bahwa penerimaan pajak dan belanja pembangunan/modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan variabel tingkat inflasi adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2006, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali), *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX*, Padang, 23-26 Agustus 2006, Hal. 1-21.
- Arsyad, Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4, Cetakan ke-2, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Djarwanto, 2001, *Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Halim, Abdul dan Subiyanto, Ibnu, 2008, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hamzah, Ardi, 2007, Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran (Studi Pada APBN 1999-2006), *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama: Membangun Pondasi Komunikasi Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik, Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim*, Surabaya, 25-26 April 2007, Hal 1-18.
- Ilyas, B.Wirawan dan Suhartono, Rudi, 2007, *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan: Sesuai Dengan UU No.7 Tahun 2000*, Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Irawan dan Suparmoko, 2002, *Ekonomika Pembangunan*, Edisi 6, Cet.1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Jumami, Nanik, 2004, *Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur*, UPN "Veteran" Jatim, Surabaya, *Unpublished*
- Kamaluddin, Rustian, 1996, *Pengantar Ekonomi Pembangunan: Dilengkapi dengan Analisis Beberapa Aspek Pembangunan Ekonomi Nasional*, Penerbit LPFE UI, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. Penerbit Erlangga, Jakarta.



- Mangkoesebroto, Guritno, 1993, *Ekonomi Publik*, Edisi ke-3, Cetakan ke-1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nanga, Muana, 2005, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi ke-2, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nazir, M, Ph.D., 1988, *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pirade, Ramon Diaz, 2006, *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, *unpublished*.
- Pracoyo, Tri Kunawangsih dan Pracoyo, Antyo, 2005, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.
- Purbadharmaja, Ida Bagus Putu, 2006, Implikasi Variabel Pengeluaran dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bali, *Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2006.
- Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Soetrisno, 1984, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Cetakan Ketiga, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Suharyadi dan Purwanto S. K., 2003, *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 1997, *Pengantar Teori Makro Eknomi Makro*, Edisi ke-2, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tarigan, 2007, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Waluyo, Joko, 2007, Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia, Parallel Session IA: Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, Wisma Makara, Kampus UI, Depok, Jakarta.



Wibisono, Yusuf, 2005, Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Januari 2005, Vol.02, hal.91-120.

Yuliati, Asnafiah, 2001, “Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Menyongsong Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Sleman, DIY)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis (KEBI)*, Vol. 6, Edisi April-Juli 2001, STIE Kerjasama (Stiekers).